

**DOMINASI PEMERINTAH SINGAPURA
DALAM LIBERALISAI EKONOMI**

Oleh: Khamidatul Helmia

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: khamidatul.helmia.2012@fisipol.umy.ac.id / hamihelmia22@gmail.com

Abstract:

In this paper, the researcher attempted to explain how is Singapore's government creates an authoritarian system which later invents the legitimacy from its citizen to support the intervention of government in economy through government's capital and single stock ownership in the economic institutions of government under three Prime Minister period which make Singapore to be one of developed countries.

Keywords: pemerintah otoriter, intervensi pemerintah, state capitalism, pembangunan ekonomi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini. Singapura telah mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi parlementer. Namun di dalam system multi partainya hanya terdapat satu partai yang berkuasa yaitu *People's Action Party* yang memegang kekuasaan untuk menciptakan stabilitas politik dan mengontrol pembangunan ekonomi Singapura yang liberal.

KEMUNCULAN PEMERINTAHAN OTORITER DI SINGAPURA

Tahun 1819, Inggris di bawah Stamford Raffles berkebangsaan Inggris yang memimpin *British East India Company* mendirikan sebuah pelabuhan dan tempat perdagangan di pulau ini. Dahulu Inggris membentuk Singapura sebagai *city-state* untuk melayani pasar Asia Timur (Low, 2002). Demi memenuhi kepentingan pemerintah Inggris di Asia Timur, Singapura dijadikan sebagai pusat perdagangan dan pusat industri yang memproduksi bahan mentah untuk menjadi barang jadi (Nizamuddin, 2007). Sebab, hal tersebut dinilai lebih hemat dari pada mengapalkan bahan-bahan mentah dari Asia untuk diproses di Inggris dan memasarkan produk jadinya di Asia Timur. Singapura dengan cepat berubah menjadi pusat pemrosesan berbagai produk seperti karet untuk industri otomobil dan peleburan timah untuk kebutuhan industri pengalengan Inggris dan Amerika Serikat. Fasilitas pengilangan minyak bumi serta fasilitas pergudangan juga dibangun di Singapura, bahkan Singapura menjadi pelabuhan dagang utama bagi Inggris di Asia Timur (Seruni, 2011). Sebagai pelabuhan dagang yang sibuk, banyak para imigran China datang untuk bekerja dan menetap.

Merdeka dari Inggris tahun 1959, Singapura masih menjadi negara substitusi impor yang kebijakan ekonominya belum liberal. Singapura melaksanakan pemilihan umum tahun 1959 dan memenangkan *People's Action Party* (PAP) sebagai partai berkuasa dan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri. Kekalahan partai BS dan merupakan negara yang berada di tengah negara-negara tetangga yang penduduk mayoritasnya Melayu, dan yang jauh lebih besar ukuran geografis, penduduk, dan sumber daya membuat Singapura sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah etnis China senantiasa merasa berada di tengah kawasan yang tidak menentu (Cipto, 2007). Politik dalam negeri merupakan persoalan paling mendasar bagi kelangsungan hidup Singapura yang merupakan negara multietnis yang pada dasarnya sangat mendambakan stabilitas dan ketertiban pada satu sisi, dan menerima imbalan

kesejahteraan material pada sisi lain. oleh karena itu, PAP dijadikan sebagai satu-satunya partai tunggal untuk mengendalikan politik domestik Singapura, dengan cara menutup pintu bagi partisipasi politik terbuka (sebagaimana di negara demokrasi maju) dan menindas oposisi agar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi andalan utama kemajuan bangsa.

Mengingat kondisi negaranya yang kecil dan miskin sumberdaya alam, Singapura lalu bergabung dengan Malaysia tahun 1963 untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan. Namun tahun 1965, Singapura melepaskan diri dari Malaysia karena konflik etnis diantara keduanya. Di awal kemerdekaan, tingkat pengangguran di Singapura cukup tinggi diperkirakan mencapai 10% dari total penduduk (Abshire, 2011), kondisi infrastruktur masih buruk, industri yang ada hanya memproduksi kebutuhan konsumsi domestik saja, dan industrialisasi dengan tarif sebagai negara yang tidak memiliki sumberdaya alam membuat pendapatan perkapita negeri ini hanya mencapai kurang dari US\$320 karena hampir tidak ada investasi asing yang masuk (Our History, 2015). Selain itu, sebagai negara kecil dan miskin sumberdaya alam, lepas dari Malaysia berarti juga kehilangan pasar domestik dan penyuplai bahan baku industri yang cukup besar. Demi keberlangsungan hidupnya, pemerintah akhirnya meliberalisasikan kebijakannya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi asing dan menguasai pasar luar negeri. Sebagai pemerintah otoriter, pemerintah Singapura juga melakukan intervensi dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal itu melalui kepemilikan modal dan saham di dalam lembaga-lembaga ekonomi yang dibangun oleh negara sebagai pengontrol investasi. Intervensi dari pemerintah itu ternyata berhasil membuat Singapura menjadi negara maju dengan berbagai prestasinya, seperti peningkatan GDP dan GNI setiap tahunnya dengan indeks pembangunan manusia terbaik ke-11 di dunia dan pertama di Asia Tenggara, mendapatkan peringkat negara terbersih dari korupsi ke-5 di dunia dan negara terbersih ke-4 di dunia, sehingga banyak event-event dunia yang diselenggarakan disana, contohnya adalah ajang olahraga Formula One (F1).

DOMINASI PEMERINTAH SINGAPURA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SINGAPURA YANG LIBERAL

Dominasi negara dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal dijalankan melalui lembaga-lembaga pengelola ekonomi, yaitu *Statutory Board* yang berada dalam pengawasan kementerian, dan perusahaan-perusahaan milik negara dan semi-negara atau *Government-Linked Companies* (GLCs), perusahaan holding milik pemerintah (*Government Holding Company*) yang berada di bawah kementerian keuangan (Abshire, 2011), dan merupakan perusahaan investasi milik pemerintah yang modalnya 100% dari pemerintah serta berperan mengelola saham *Government-Link Companies* (Penjelasan Proses Bisnis Temasek Holdings: Batasan Peran Pemerintah dalam Manajemen Internal Perusahaan Negara, 2014).

Liberalisasi Ekonomi Singapura

Liberalisasi ekonomi Singapura diikuti oleh pembukaan pasar secara bebas dan peningkatan industri yang didukung oleh pembangunan perusahaan-perusahaan milik negara atau GLCs, mulai dilakukan pada masa-masa awal kemerdekaan tahun 1965. Proses liberalisasi ekonomi Singapura ditunjukkan melalui liberalisasi kebijakan ekonomi. Sebelum tahun 1965, kebijakan ekonomi Singapura adalah industrialisasi substitusi impor yang memberlakukan retribusi pada kegiatan ekspor impornya. dan berubah menjadi industri ekspor tahun 1967 setelah Singapura menjadi *Republic independent* (Liberalisasi Kebijakan Ekonomi Singapura dan Faktor-faktor yang Mendorong Singapura Melakukan Kerjasama Dengan Indonesia Terkait dengan Pemanfaatan Free Trade Zone di Wilayah Batam, 2010).

Untuk mendukung pembukaan pasar secara bebas, pemerintah Singapura mulai melakukan liberalisasi perdagangan dan aktif menjalin kerjasama liberalisasi ekonomi. Pada tahun 1967, pemerintah Singapura mengganti kuota dengan tariff untuk melindungi industri lokal. Pada tahun 1973, Singapura terlibat aktif dalam

perundingan kerjasama liberalisasi ekonomi global *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Tokyo dan meratifikasi Tokyo Round (1973-1979) untuk mendukung perdagangan bebas barang, sejak setelah itu, pemerintah melakukan penurunan tarif secara cepat. Tahun 1986, aktif kembali mengikuti perundingan GATT di Uruguay (Uruguay Round 1986-1993), dan tahun 1989, menjadi anggota APEC dengan tujuan untuk menyalurkan kepentingan liberalisasi perdagangan di Asia Pasifik. Memasuki tahun 1994, penurunan tarif telah mencapai di bawah angka 5% kecuali untuk minuman beralkohol dan mobil (Yeung, 2000). Tahun 1992, Singapura dan anggota ASEAN lainnya membentuk AFTA untuk mengupayakan hilangnya hambatan-hambatan perdagangan dari negara-negara anggota ASEAN dan membuka peluang investasi industri Singapura di negara-negara itu (Gavin Peebles, 1996) dan tahun 1995, Singapura menjadi anggota tetap *World Trade Organization* (WTO), yang juga mewajibkan lingkup investasi yang bebas, sehingga pada tahun 2000, penurunan tariff telah mencapai angka 0%, dan liberalisasi perdagangan yang dilakukan Singapura sudah mencapai tahap yang matang (Liberalisasi Kebijakan Ekonomi Singapura dan Faktor-faktor yang Mendorong Singapura Melakukan Kerjasama Dengan Indonesia Terkait dengan Pemanfaatan Free Trade Zone di Wilayah Batam, 2010).

Tahap Pembangunan Ekonomi melalui Peningkatan Industri di bawah Tiga Perdana Menteri (1965-2012)

1. *Periode Kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew (1965-1990)*

Kebijakan *Economic Expansion Incentives Act* tahun 1967 adalah liberalisasi kebijakan yang ditujukan untuk menarik investasi asing (Trocki, 2006) demi menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Singapura, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investasi asing, meliputi pembebasan pajak yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan teknologi dan pemasukan bagi Singapura. Pajak yang dibebaskan bisa mencapai 15 tahun tergantung pada keuntungan yang diberikan perusahaan-perusahaan asing

tersebut (Economic Expansion Incentives Act, 2011). Penarikan investasi asing itu diimbangi oleh pembangunan perusahaan-perusahaan baru milik negara sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap sistem ekonomi negara yang liberal.

Di awal kemerdekaannya, melalui *Economic Development Board* sebagai salah satu *statutory board* milik pemerintah, Singapura melakukan tiga tahap pembangunan, sebagai upaya mendukung kebijakan *Economic Expansion Incentives Act* (Our History, 2015):

Tahap pertama adalah periode tahun 1967-1969. Pemerintah melakukan pembangunan yang ditujukan pada penyediaan infrastruktur yang kondusif demi mempersiapkan Singapura sebagai tempat yang menarik bagi investasi asing dalam industri padat karya (*low-skill, low-wage manufacturing jobs*) yang berorientasi ekspor. Tidak hanya pembebasan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menarik investasi asing, tetapi juga tenaga kerja dengan gaji rendah. Upaya tersebut berhasil mendatangkan banyak investor asing seperti industri garmen, tekstil, produk berbahan dasar kayu, dan industri rambut palsu, sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Singapura. Sebagai salah satu pelabuhan dagang terbesar di dunia, dan banyak didominasi perusahaan privat, maka pemerintah mendirikan perusahaan milik negara untuk mengimbangi dana dan keahlian dari perusahaan sektor privat. GLCs utama yang didirikan pemerintah adalah *Keppel Corporation* dan *Jurong Shipyard* pada tahun 1968, yang mendukung Singapura sebagai pusat penyedia properti dan infrastruktur bagi pembuatan kapal, dan pusat perbaikan kapal, *Development Bank of Singapore* (DBS) untuk menyediakan dana pembangunan (Carlos D. Ramirez, 2003), dan pada 5 November 1968, pemerintah mendirikan GLCs yang bergerak dalam bidang perdagangan, yaitu INTRACO sebagai upaya mendukung kebijakan liberalisasi perdagangan dan memperluas ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan peningkatan modal pada perusahaan industri manufaktur pemerintah yang sudah ada, seperti *NatSteel*, perusahaan penggilingan besi dan biji baja dari tahun 1961. Selain itu, pemerintah melakukan

nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor privat yang kurang modal dan ahli seperti, *Singapore Airlines* (perusahaan penerbangan), *Neptune Orient Lines* (perusahaan pelayaran container global), dan *Sembawang Shipyard* (perusahaan pembuatan galangan kapal) (Setiawan, 2015). Pemegang saham tunggal dari perusahaan milik negara dan perusahaan yang dinasionalisasi adalah Kementerian Keuangan. Pada periode ini, EDB terus aktif bertugas untuk memasarkan Singapura pada investor di luar negeri dengan cara membuka kantor layanan seperti di Hong Kong dan New York. Dan pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun berdasarkan nilai tambah manufaktur pada periode ini adalah 18,1% (Trocki, *Singapore Wealth, Power and the Culture*, 2006).

Tahap pembangunan kedua adalah pada tahun 1970-1979. Pada periode ini, angka pengangguran sudah tidak lagi menjadi masalah, yang semula sekitar 10% berkurang menjadi sekitar 3% dari total penduduk (Profil Kota Singapura 47806: Kota Berketahanan Iklim Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana, 2013). Beberapa perusahaan yang dibangun oleh pemerintah pada periode ini contohnya, *Singapore Refining Company* yang merupakan perusahaan bersama atau *joint venture* dengan Caltex dan British Petroleum, sebagai penyedia katalis dalam pertumbuhan industri kilang minyak, dan *Petrochemical Corporation of Singapore* usaha *joint venture* dengan Shell dan Japanese Consortium dalam industri petrokimia (Carlos D. Ramirez, 2003). Tahun 1974, pemerintah Singapura mendirikan perusahaan holdings pemerintah, yaitu *Temasek Holdings*, sebuah perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura, dimana pemegang saham tunggalnya adalah Departemen Keuangan. *Temasek Holdings* dibentuk oleh pemerintah Singapura untuk membedakan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemilik saham (Satrio, 2015). Setelah terbentuknya *Temasek Holdings*, saham perusahaan-perusahaan milik pemerintah (GLCs) dikelola oleh *Temasek Holdings*. *Temasek Holdings* secara teratur memantau kinerja portofolio dan investasi perusahaan-perusahaan besar milik

pemerintah yang ada di bawahnya, namun tidak memberikan arahan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional dan komersial dari portofolio perusahaan yang dipegangnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang memerlukan persetujuan dari pemegang saham (Holding Company BUMN, 2010). Pada periode ini, pemerintah mulai mengembangkan industri semi-intensif, seperti suku cadang computer, perangkat lunak computer, dan produk-produk elektronik lainnya. Untuk mengelola industri tersebut, dibentuklah *National Computer Board*. Dan untuk mendukung investasi pemerintah dalam bidang itu, pemerintah mendirikan GLCs, seperti *Singapore Computer System Ltd* dan *Tec Singapore Electronic PTE Ltd* (Yuverev, 2011). Gencarnya upaya EDB menarik investor dari Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, semakin meningkatkan kehadiran investor asing yang menanamkan modalnya di Singapura. Untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil, pemerintah membangun Unit Ketenagakerjaan dan Pelatihan, serta mengadakan program-program pelatihan dan magang tenaga kerja bersama, seperti dengan perusahaan Tata dari India, Philips dari Belanda, dan Rollei dari Jerman.

Tahap pembangunan ketiga, yaitu periode tahun 1980-1989. Periode ini disebut sebagai era revolusi industrial kedua. Negara ini mulai bergerak menuju aktivitas-aktivitas berteknologi tinggi, seperti desain *engineering* dan jasa *software* komputer. Contoh GLCs yang dibangun untuk mendukung sektor ini adalah *Singapore Technologies Engineering* (Yuverev, 2011). Dalam mendukung peningkatan dalam industri itu, pemerintah melakukan peningkatan gaji pekerja untuk menarik minat pekerja terutama pekerja asing bekerja dalam industri berteknologi tinggi dan memperbaharui penekanan pada pengembangan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga ahli dari Singapura di bidang komputer dan *engineering* (Setiawan, 2015). Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan, pemerintah melalui EDB membangun *Science Park* di *National University of Singapore* untuk menstimulasi sektor swasta melakukan

aktivitas penelitian dan pengembangan, dan pemberian *Robot Leasing Scheme* untuk menawarkan pembiayaan dengan ongkos yang rendah bagi konsultasi teknis manufaktur yang ingin mengotomasi proses produksinya (Our History, 2015).

Investasi yang berkelanjutan di Singapura telah membuat infrastruktur negara ini menjadi yang paling modern dan efisien di dunia. Antara tahun 1977 dan 1982, ekspor minyak Singapura hampir 40% secara tetap menjadi pendapatan dari ekspor manufaktur dan berkontribusi rata-rata hampir 6% dari GDP. Setelah tahun 1982, bentuk manufaktur lain, terutama elektronik meningkat, sedangkan minyak menurun kurang lebih 15%-16% dari total ekspor manufaktur. Dan sejak tahun 1985, komponen dan produk elektronik menjadi pendapatan utama dari ekspor, penyumbang 34.5% dari total ekspor manufaktur. Di tahun 1962, lebih dari 45% pendapatan manufaktur Singapura berasal dari keseluruhan perusahaan lokal dan itu meyerap lebih dari 66% dari total kekuatan pekerja. Perusahaan asing hanya menyumbangkan 31.4% terhadap pendapatan dan hanya mempekerjakan 14.1% dari kekuatan pekerja. Sejak 1985, keseluruhan perusahaan asing menyumbangkan 54.5% terhadap pendapatan dan mempekerjakan 41% dari kekuatan pekerja, sedangkan perusahaan lokal menyumbangkan 20,3% terhadap pendapatan dan mempekerjakan 33,5% dari kekuatan pekerja (Chia, 1989). Selain itu, nilai tambah nominal perpekerja manufaktur meningkat dari \$18.400 pada tahun 1979 menjadi \$27.000 pada tahun 1985 (Setiawan, 2015).

2. *Periode kepemimpinan Perdana Menteri Goh Chok Tong (1990-2004)*

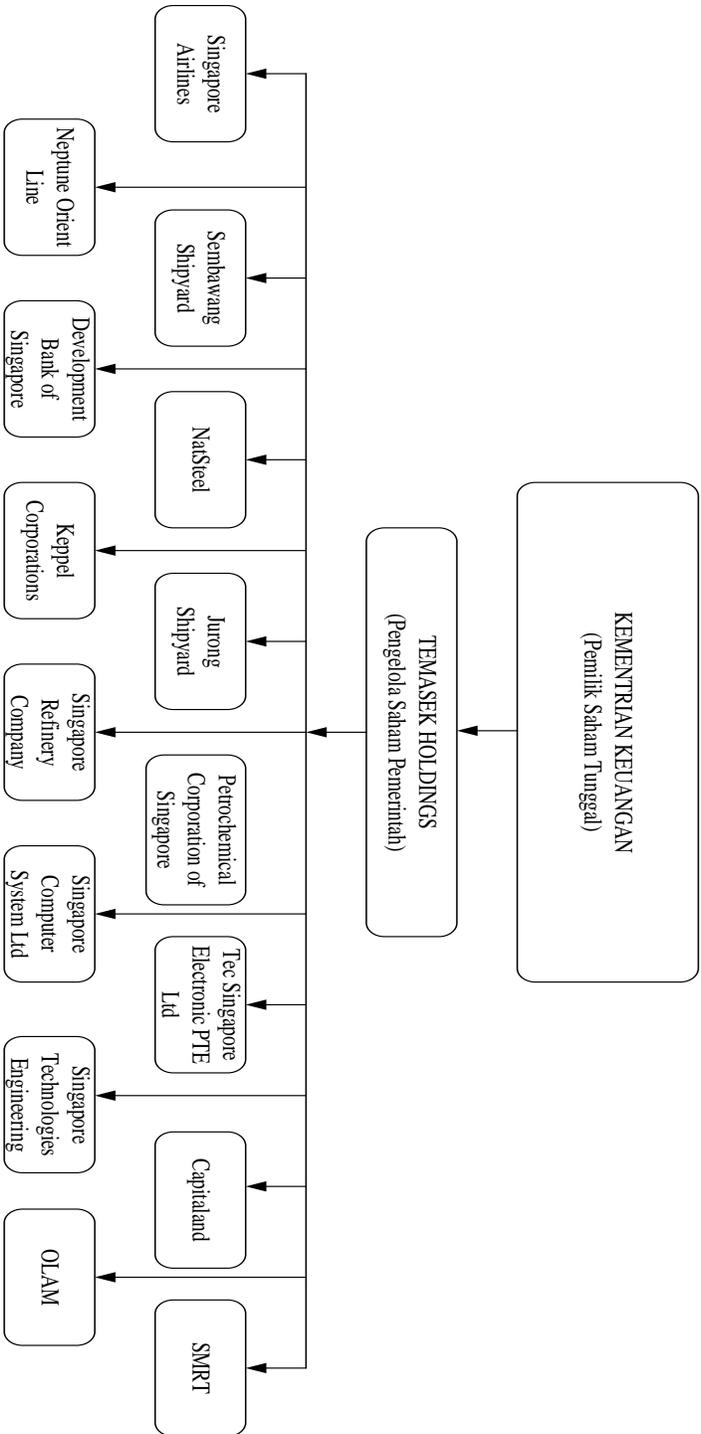
Pada periode tahun 1990an, pemerintah Singapura mulai mendiversifikasi aktivitas ekonominya dalam industri kimia, farmasi, dan kesehatan (Our History, 2015). Hadirnya pesaing-pesaing baru yang cukup inovatif di Asia Timur pada industri elektronik, membuat Singapura menyadari bahwa industri elektronik tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya tumpuan ekonomi negara ini. Selain itu, pemerintah lebih mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk berinvestasi di luar negeri

dan membawa masuk kembali keuntungan yang mereka dapat, seperti dalam bidang keuangan, pelatihan dan jasa manajemen (Trocki, Singapore Wealth, Power and the Culture, 2006). Namun, kebijakan itu tidak lalu mengesampingkan upaya menarik perusahaan asing untuk masuk ke Singapura. Berbagai dana intensif keuangan, seperti pajak diberikan untuk mendorong perusahaan lokal berinvestasi keluar.

Diawal tahun 1993 beberapa perusahaan lokal pemerintah berhasil memperluas investasinya di luar negeri. Dibidang telekomunikasi, seperti; *Temasek Holdings*, *Singapore Airline*, *Neptune Orient Line*, *Singapore Technology Engineering* yang sahamnya menjadi nomor satu banyak dibeli di Australia, dan dibidang keuangan yaitu DBS (Trocki, Singapore Wealth, Power and the Culture, 2006). Namun, pemerintah tidak menjual seluruh saham dari perusahaan-perusahaan lokal itu, 50% lebih saham masih dikuasai pemerintah Singapura sendiri (M, 2011). Dan untuk mendukung promosi investasi jasa ke luar negeri, pemerintah menawarkan beberapa dana insentif, seperti tunjangan investasi untuk investasi pada sektor jasa. Tahun 1991-2000, pemerintah melakukan penekanan lagi untuk memperdalam basis teknologi dengan menyediakan dana pelatihan dan pengembangan bagi pekerja ahli Singapura melalui badan penyedia infrastruktur bagi lembaga penelitian dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu *Telecommunication Authority of Singapore*, yang pada 1 Desember 1999, digantikan oleh *Infocomm Development Authority of Singapore* setelah TAS melakukan *marger* dengan *National Computer Board*. Tahun 1991-1995, pemerintah menyediakan dana sebesar \$2.000.000.000 melalui *The National Technology Plan*, dan \$4.000.0000.000 pada tahun 1996-2000 melalui *The National Science and Technology Plan* (Setiawan, 2015). Selanjutnya, pemerintah terus mengembangkan investasinya melalui *Temasek Holdings* selain dalam bidang industri manufaktur. Beberapa contohnya adalah di bidang *real estate*, pemerintah membangun GLCs bernama *Capitaland*, di bidang agribisnis, pemerintah

membangun GLCs bernama OLAM, dan dibidang jalur transportasi cepat, pemerintah mendirikan GLCs bernama *Singapore Mass Rapid Transit* (SMRT). Pencapaian ekonomi Singapura terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Total investasi asing langsung meningkat dari SG\$16.9 milyar di tahun 1990 menjadi SG\$70.6 milyar diakhir tahun 1997. Sedangkan total perdagangan meningkat, dari SG\$ 12.3 milyar menjadi SG\$ 25.7 milyar antara tahun 1970 dan 1993. Dari total GDP tercatat, bahwa nilai ekspor meningkat dari 101.6% pada tahun 1965 menjadi 134% pada tahun 1993. Demikian, impor meningkat dari 128% menjadi 155% dari total GDP pada periode yang sama (Rodan, 2004).

Dari uraian di atas, maka dapat dibentuk bagan sebagai berikut:



3. *Periode kepemimpinan Perdana Menteri Lee Hsein Loong (2004-2012)*

Sebagai negara yang kekurangan sumberdaya alam, selama bertahun-tahun pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola sumberdaya manusia yang ada, karena hal tersebut dianggap sebagai sumber penting bagi daya saing dan kekuatan ekonomi. Dan sebagai strategi untuk menjadikan Singapura sebagai *global city*, pemerintahan sebelumnya secara agresif memberlakukan kebijakan imigrasi dan liberalisasi pekerja asing. Atas kebijakan tersebut, dari tahun 2000 hingga 2011, jumlah penduduk *non-residents* meningkat dari 754.500 menjadi 1.394.400 (Singapore Workforce Development Agency, 2012). Menanggapi hal itu, pada periode kepemimpinan PM Loong, kebijakan pemerintah lebih kepada mengelola ketergantungan tenaga kerja asing dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal (Structural Policy Country Notes: Singapore, 2013).

1. Meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal dengan kerjasama sektor privat. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal adalah: dengan membuka Skema Pelatihan dan pengembangan, seperti *Workfare Training Support Scheme* (WTS) tahun 2010, untuk mendorong para pengusaha mengirimkan para pekerja rendahnya mengikuti pelatihan dengan WTS memberikan subsidi 95% dari biaya pelatihan dan gaji ketidakhadiran, dan akan memberikan hadiah sebesar SGD 400 (Singapura dolar) setahun untuk pekerja yang berhasil menyelesaikan modul pelatihan (National Survey of R&D 2010, 2013).

Selain WTS, tahun 2011 pemerintah memberikan Pendidikan Lanjutan dan Skema Pelatihan, *Continuing Education and Training* (CET) untuk para profesional, manajer, eksekutif dan para teknisi (PMETs), melalui perluasan program degree dan diploma. Pada saat yang sama, pemerintah terus menaikkan modal sumber daya manusia melalui investasi dalam bidang infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Tahun 2009, *Singapore University of Technology and Design* (SUTD) didirikan dengan fokus yang kuat mengenai inovasi dan kewirausahaan. SUTD

memiliki kemitraan strategis dengan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) di Amerika Serikat dan *Zhejiang University* di Cina. Tahun 2012, kerjasama kampus *the Yale-National University Singapore* dibuka untuk memberikan lebih banyak pendidikan sampingan berkualitas tinggi bagi warga Singapura. Pada tingkat yang lebih rendah, pemerintah memperluas Politeknik dan Lembaga Pendidikan Teknis (ITEs) untuk melengkapi lulusan dengan berbagai keterampilan teknis pada tingkat diploma (Structural Policy Country Notes: Singapore, 2013).

2. Mengelola ketergantungan tenaga kerja asing

Pemerintah melakukan tindakan mengenai harga dasar dan kuantitas pada tahun 2011 dan 2012 untuk menyesuaikan aliran pekerja asing, seperti pungutan tinggi pada pekerja asing, pengetatan kriteria untuk persetujuan izin kerja dan kartu lamaran tenaga kerja, dan penurunan kuota pekerja, telah dijalankan selama tahun 2011 dan 2012 untuk, Selain itu, untuk mendorong perusahaan mengurangi ketergantungan pada pekerja asing dengan kemampuan rendah, yaitu dengan mengkualifikasi gaji, dan memperkenalkan berbagai program berdasarkan kualifikasi keterampilan kerja (*Workforce Skills Qualification*) dalam rangka membantu perusahaan menilai dan menjamin tingkat keterampilan dari potensi pekerja asing (Structural Policy Country Notes: Singapore, 2013).

Tindakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan pekerja asing, yang ditandai dengan berkurangnya penduduk tetap baru, yaitu dari 79.167 penduduk baru tetap dan 20.513 warga negara baru di tahun 2008, menjadi 27.521 penduduk baru tetap dan 15.777 warga negara baru di tahun 2011 (National Population and Talent Division, 2014).

PENUTUP

Dalam pembangunan ekonomi Singapura setelah melakukan liberalisasi kebijakan ekonomi, intervensi pemerintah Singapura dijalankan melalui kepemilikan modal dan saham di dalam lembaga-lembaga ekonomi negara yang dibangun pemerintah sebagai

pengontrol investasi. Lembaga-lembaga ekonomi pemerintah itu adalah badan *Statutory Board* yang berada dalam pengawasan kementerian, dan perusahaan-perusahaan milik negara dan semi negara atau *Government-Linked Companies* (GLCs) dan perusahaan holding milik negara atau *Government Holdings Company*.

Referensi

- Abshire, J. E. (2011). *The Greenwood Histories of The Modern Nations; The History of Singapore*. California: Greenwood.
- Carlos D. Ramirez, L. H. (2003). Singapore, Inc. Versus the Private Sector: Are Government-Linked Companies Different? . *IMF Working Paper*, 1-22.
- Chia, S. (1989). The character and progress of industrialization. In K. a. P.Wheatley, *Management of Success: The Moulding of Modern Singapore* (p. 257). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Economic Expansion Incentives Act*. (2011, Januari 2). Retrieved from <http://statutes.agc.gov.sg>
- Gavin Peebles, P. W. (1996). *The Singapore Economy*. US: Edward Elgar.
- Liberalisasi Kebijakan Ekonomi Singapura dan Faktor-faktor yang Mendorong Singapura Melakukan Kerjasama Dengan Indonesia Terkait dengan Pemanfaatan Free Trade Zone di Wilayah Batam*. (2010, Mei 5). Retrieved from <http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab3.pdf>
- Low, L. (2002). The Limits of A City State: Or Are There?., In D. D. Cunha, *Singapore in the Millenium: challenges facing the city state*, (p. 9). Singapore: Institute of Southeast Asean Studies.
- M, M. N. (2011, Februari 25). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Singapura dan Dukungannya terhadap Pengembangan Industri Transportasi Udara Melalui Kerjasama Liberalisasi, Singapura dan kerja-Metodhologi*. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135843-T%2027993-Singapura%20dan%20kerja-Metodologi.pdf>
- National Population and Talent Division*. (2014). Retrieved from Singapore Government: <http://www.nptd.gov.sg/>

- National Survey of R&D 2010. (2013, Juni). *OECD Main Science and Technology Indicators Database*. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1787/888932774528>
- Nizamuddin, A. M. (2007). Multinational Corporations and Economic Development: The Lessons of Singapore. *International Science Review*, 154.
- Our History*. (2015, Juni 4). Retrieved from Future Ready Singapore: <https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/about-singapore/our-history/1960s.html>
- Penjelasan Proses Bisnis Temasek Holdings: Batasan Peran Pemerintah dalam Manajemen Internal Perusahaan Negara*. (2014, Februari 5). Retrieved from Direktorat Jendral Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/detail/batasan-peran-pemerintah-dalam-manajemen-internal-perusa>
- Profil Kota Singapura 47806: Kota Berketahanan Iklim Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana*. (2013, Maret 27). Retrieved from <http://www-wds.worldbank.org>
- Rodan, G. (2004). International capital, Singapore's state companies, and security, . *Critical Asian Studies* , 153.
- Satrio. (2015, Februari 26). *Lee Kuan Yew dan Nasib Temasek*. Retrieved from Indonesian Reviess: <http://indonesianreview.com/satrio/lee-kuan-yew-dan-nasib-temasek>
- Seruni. (2011, Februari 25). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Singapura dan Dukungannya terhadap Pengembangan Industri Transportasi Udara Melalui Kerjasama Liberalisasi*. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135843-T%2027993-Singapura%20dan%20kerja-Metodologi.pdf>
- Setiawan, A. (2015, Maret 27). *Strategi Singapura dalam Menghadapi Globalisasi*. . Retrieved from Public Policy and Research Center Indonesia : <http://pprcindonesia.org/strategi-singapura-dalam-menghadapi-globalisasi/>
- Singapore Workface Devlopment Agency*. (2012). Retrieved from Singapore Government: http://www.wda.gov.sg/content/wdawebwebsite/programmes_and_initiatives/WT_S_TrainingGrant_Individual.html
- Structural Policy Country Notes: Singapore*. (2013, Februari 19). Retrieved from <http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/Singapore.pdf>

- Trocki, C. A. (2006). *Singapore Wealth, Power and the Culture*. London and New York: Routledge.
- Trocki, C. A. (2006). *Singapore Wealth, Power and the Culture*. London and New York: Routledge.
- Yeung, H. W.-C. (2000). State intervention and neoliberalism in the globalizing world economy: lesson from Singapore's regionalization programe. *The Pacific Review*, 137.
- Yuverev, O. (2011). *PlanetInform's Global Directory for Major Electronics&Electrical Equipment Wholesalres*. books.google.co.id. Retrieved from <https://books.google.co.id>
- ,(2010). *Holding Company BUMN*. Jakarta: Harian Suara Pemberitahuan. Retrieved from <http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/holding/holding-company-bumn>